

BAB II

BLACKFACE SEBAGAI BENTUK KEBERLANJUTAN DALAM MEMPERTAHANKAN HEGEMONI KULIT PUTIH

Dalam bab dua ini peneliti memberikan masing-masing fokus pada setiap sub-bab, hal ini dilakukan untuk memfokuskan pembahasan mengenai alur kelahiran Ideologi *White Supremacy* serta berbagai cara mempertahankan Ideologi tersebut. Dan salah satu cara *white supremacy* dalam mempertahankan hal tersebut melalui blackface yang merupakan bentuk dari *cultural appropriation* kemudian digunakan sebagai pertahanan untuk melanjutkan hegemoni kulit putih di Amerika Serikat, salah satu contoh dari blackface pada abad ke-21 ini terjadi dalam fashion show yang diselenggarakan oleh *Fashion Institute of Technology* (FIT) pada 7 Februari 2020.

2.1 White Supremacy

2.1.1 Era Ekspedisi Colombus, Sebagai Peletak Batu Pertama Ideologi

White Supremacy

White supremacy lahir di Eropa sebagai ideologi yang meyakini superioritas ras kulit putih, khususnya ras Arya, atas ras lainnya. Ideologi ini bermula dari beberapa peristiwa besar seperti peristiwa Perang Salib dan runtuhnya Romawi Timur, peristiwa perang tiga puluh tahun, *Tordesalias Trinity*, dan peristiwa penjelajahan benua yang mana hal ini mengubah

pemikiran lapisan masyarakat mereka. Dalam hal ini Perang Salib (1095-1291) yang melibatkan pasukan Kristen Eropa melawan Muslim di Timur Tengah, serta kejatuhan Kekaisaran Romawi Timur (Bizantium) yang dikuasai oleh Kesultanan Ottoman pada tahun 1453, menguatkan posisi dan pengaruh Gereja Katolik di Eropa, dalam hal ini gereja dianggap sebagai benteng Kristen yang harus mempertahankan superioritas dan dominasinya (Zinn, 2003). Gagasan superioritas Gereja Katolik dan budaya Kristen Eropa atas yang lain, termasuk dunia Muslim dan non-Eropa, semakin mengakar. Hal ini tercermin dalam Perjanjian *Tordesillas* pada tahun 1494 yang membagi dunia baru di antara Spanyol dan Portugis berdasarkan kepentingan Eropa (Zinn, 2003). Melalui Perang Salib, hegemoni Gereja Katolik, penjelajahan dan kolonisasi, gagasan superioritas ras kulit putih Eropa atas bangsa-bangsa lain semakin menguat. Doktrin ini kemudian menjadi dasar legitimasi bagi berbagai praktik penindasan, perbudakan, dan imperialisme Eropa di dunia selama berabad-abad. Ekspedisi yang dilakukan oleh Christopher Columbus ke Amerika pada 1492 dilandasi oleh semangat menyebarkan agama Kristen dan budaya Eropa. Kolonialisme yang dijalankan oleh Spanyol dan Portugis di Amerika kemudian berkembang menjadi sistem eksploitasi sosial yang didukung oleh doktrin white supremacy (Zinn, 2003).

Sejarah perjalanan white supremacy di Amerika bermula pada abad ke-15 ketika Christopher Columbus menemukan Kepulauan Karibia. Motivasi eksplorasi Eropa saat itu dikenal dengan slogan 3G: Gold (emas), Glory

(kejayaan), dan Gospel (penyebaran agam Kristen). Pertemuan awal Columbus dengan suku Arawak di Karibia tampaknya damai. Columbus mencatat (Zinn, 2003) keramahan dan kedermawanan penduduk asli:

“are so naïve and so free with their possessions that no one who has not witnessed them would believe it. When you ask for something they have, they never say no. To the contrary, they offer to share with anyone. . . .”

Namun, hubungan ini segera berubah menjadi eksploitasi. Setelah kembali ke Eropa, Columbus mendapat dukungan untuk ekspedisi lebih besar dengan tujuan memperbudak penduduk asli dan mengambil kekayaan mereka. Akibatnya, dalam dua tahun terjadi penurunan drastis populasi penduduk asli diperkirakan 250.000 orang meninggal karena berbagai sebab seperti perbudakan, penyakit, kekerasan, peracunan makanan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa dan beberapa lainnya melakukan bunuh diri. Walaupun dalam perlakuan Columbus terhadap penduduk asli Amerika, yang awalnya terlihat baik namun berubah menjadi eksploitasi kolonial, menjadi representasi awal dari ideologi white supremacy (Zinn, 2003). Ideologi ini, yang berakar pada keyakinan superioritas ras kulit putih, terus mempengaruhi masyarakat Amerika hingga saat ini, menciptakan warisan ketidaksetaraan dan diskriminasi rasial yang masih dirasakan dampaknya. Kejadian ini berlangsung hingga abad-ke 16 dan pada abad ke-17 orang-orang Eropa yang disebut sebagai *White Anglo Saxon-Protestant (WASP)* membuat pemukiman di dataran Amerika (Rujito, 2015).

2.1.2 White Supremacy Pada Era Kolonisasi Inggris Pertama

Jamestown, Virginia Pada Abad ke-17 Dan Era Berdirinya Amerika Serikat (1700-1776)

White supremacy atau supremasi kulit putih mulai terbentuk di Amerika sejak kolonisasi Inggris pertama kali di Jamestown, Virginia pada awal abad ke-17. Dari sana, gagasan bahwa orang kulit putih secara alami lebih unggul dibandingkan ras lain, terutama orang Afrika, mulai berkembang dan menjadi fondasi dalam struktur sosial dan ekonomi yang terus berlanjut hingga terbentuknya Amerika Serikat pada akhir abad ke-18 (Zinn, 2003). Jamestown didirikan pada tahun 1607 sebagai koloni permanen Inggris pertama di Amerika Utara. Pada awalnya, para kolonis Inggris yang datang ke Jamestown mempekerjakan pekerja kontrak dari Eropa, yang sebagian besar adalah orang kulit putih. Para pekerja kontrak ini bekerja selama beberapa tahun untuk melunasi biaya perjalanan mereka ke Amerika, dan setelah itu mereka diberi kebebasan dan, sering kali, tanah. Namun, pada tahun 1619, kapal Belanda tiba di Jamestown dengan membawa sekitar 20 orang Afrika yang kemudian dijadikan pekerja. Pada awalnya, status orang Afrika ini sama dengan para pekerja kontrak Eropa, namun dengan cepat, sistem perbudakan mulai berkembang dan diterapkan secara khusus pada orang Afrika. Dalam beberapa dekade, status orang Afrika yang datang ke Amerika berubah dari pekerja kontrak menjadi budak permanen yang tidak pernah bisa bebas. Perubahan ini

didorong oleh kebutuhan ekonomi. Pertanian tembakau, yang menjadi tulang punggung ekonomi di koloni Virginia, membutuhkan tenaga kerja yang murah dan stabil. Orang kulit hitam dianggap sebagai pilihan ideal karena mereka bisa dijadikan budak seumur hidup, dan status mereka diwariskan kepada anak-anak mereka. Pada pertengahan abad ke-17, hukum-hukum di koloni mulai memperkuat perbedaan status antara pekerja kulit putih dan orang Afrika yang diperbudak, memperkenalkan undang-undang yang memperkuat gagasan bahwa orang kulit hitam adalah properti, bukan manusia dengan hak. Selama abad ke-17, supremasi kulit putih mulai berkembang sebagai ideologi yang menopang sistem perbudakan rasial yang terstruktur. Orang Afrika yang diperbudak dipisahkan secara hukum dari pekerja kulit putih, dan hukum-hukum baru menetapkan bahwa perbudakan adalah keadaan turun-temurun yang hanya berlaku bagi orang Afrika dan keturunan mereka. Sistem ini memungkinkan koloni untuk membedakan secara tajam antara orang kulit putih dan orang kulit hitam, memperkuat hierarki rasial di mana orang kulit hitam dipandang sebagai kelas pekerja yang lebih rendah, tanpa hak kebebasan atau kepemilikan pribadi. Ini tidak hanya menciptakan jurang sosial, tetapi juga membentuk dasar bagi konsep white supremacy, yang mulai mengakar dalam masyarakat Amerika (Zinn, 2003).

Pada abad ke-18, supremasi kulit putih menjadi landasan ideologi pada masyarakat koloni Amerika. Ekonomi pertanian di wilayah selatan seperti Virginia dan Carolina sangat bergantung pada perbudakan, dan perbudakan

rasial semakin terpusat sebagai sistem yang diatur oleh hukum. Orang kulit putih mulai semakin jelas diidentifikasi sebagai penguasa sosial dan politik, sementara orang kulit hitam yang diperbudak diperlakukan sebagai properti yang tidak memiliki hak asasi. Meskipun prinsip-prinsip kesetaraan manusia mulai didiskusikan di antara pemikir-pemikir era Pencerahan, seperti yang diwakili oleh Revolusi Amerika pada 1776, realitas kehidupan di koloni menunjukkan kontradiksi besar. Para pemimpin revolusi Amerika seperti Thomas Jefferson dan George Washington, yang memperjuangkan kebebasan dari penindasan Inggris, sendiri adalah pemilik budak. Meskipun mereka berbicara tentang hak-hak individu dan kebebasan, konsep-konsep ini tidak berlaku bagi orang Afrika yang diperbudak. Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 menyatakan bahwa "semua manusia diciptakan setara", namun ini hanya diterapkan pada orang kulit putih, terutama pria kulit putih. Orang Afrika yang diperbudak dan penduduk pribumi Amerika sama sekali tidak diakui dalam gagasan ini. Sebaliknya, ideologi white supremacy terus berkembang sebagai cara untuk membenarkan perbudakan dan penguasaan rasial di Amerika yang baru merdeka (Zinn, 2003). Melalui hal ini, sekitar akhir abad ke-18 mulai muncul gerakan Abolisisionis (anti-perbudakan), gerakan ini dipimpin oleh kelompok-kelompok Quaker dan tokoh-tokoh tertentu di Amerika Utara yang menentang sistem perbudakan. Meskipun gerakan ini masih minoritas, suara-suara yang menyerukan kesetaraan dan hak asasi

manusia mulai terdengar di tengah masyarakat Amerika yang semakin terpecah dalam pandangan tentang perbudakan (Zinn, 2003).

2.1.3 White Supremacy Pada Era Deklarasi Kemerdekaan dan Perbudakan (1776-1789), Era Republik, Era Ketegangan Perbudakan, dan Era Lahirnya Blackface Minstrelsy (1789-1861)

Ketika Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris pada 1776, ide-ide kebebasan, hak-hak individu, dan kesetaraan manusia diusung sebagai landasan utama negara baru ini. Namun, konsep tersebut mengandung kontradiksi mendalam. Meskipun Deklarasi Kemerdekaan menyatakan bahwa "semua manusia diciptakan setara," kenyataannya, gagasan ini tidak berlaku bagi semua orang di Amerika. Orang-orang Afrika yang diperbudak tidak dianggap sebagai bagian dari "manusia" yang memiliki hak asasi, dan gagasan *white supremacy* atau supremasi kulit putih terus mengakar dalam tatanan sosial-politik negara. Pada saat Deklarasi Kemerdekaan ditandatangani, perbudakan sudah menjadi bagian integral dari ekonomi dan kehidupan sosial di koloni-koloni Amerika, terutama di wilayah Selatan yang sangat bergantung pada tenaga kerja budak untuk pertanian, seperti produksi tembakau dan kapas. Pemimpin-pemimpin Amerika, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Thomas Jefferson dan George Washington, adalah pemilik budak yang percaya pada supremasi kulit putih sebagai landasan status sosial mereka.

Meskipun beberapa di antara mereka menyuarakan keraguan pribadi tentang perbudakan, mayoritas tetap mendukung sistem yang menguntungkan mereka secara ekonomi (Zinn, 2003).

Pada tahun 1787, Konstitusi Amerika Serikat disusun sebagai kerangka hukum dan pemerintahan negara baru. Konstitusi ini juga menunjukkan ambivalensi yang jelas terhadap isu perbudakan. Meskipun kata "perbudakan" tidak secara eksplisit disebutkan dalam dokumen tersebut, ada beberapa klausul yang melindungi kepentingan para pemilik budak. Salah satunya adalah Kompromi Tiga Perlima (*Three-Fifith Compromise*), yang menetapkan bahwa setiap budak akan dihitung sebagai tiga perlima dari seorang warga negara untuk tujuan perwakilan di Kongres. Hal ini memperkuat supremasi kulit putih dalam pemerintahan karena negara-negara bagian Selatan yang memiliki populasi budak besar mendapatkan kekuatan politik lebih banyak, meskipun orang-orang yang diperbudak tidak memiliki hak-hak politik. Selain itu, Konstitusi juga melindungi perdagangan budak setidaknya sampai tahun 1808, memberi waktu bagi negara-negara bagian Selatan untuk terus mengimpor tenaga kerja budak dari Afrika. Dengan demikian, supremasi kulit putih diabadikan dalam hukum dasar negara (Lynd, 1966).

Setelah terbentuknya republik Amerika, supremasi kulit putih tetap menjadi landasan masyarakat, terutama di wilayah Selatan. Sementara negara-negara bagian Utara mulai menghapus perbudakan secara bertahap, di Selatan,

sistem perbudakan semakin mendalam dan diperluas seiring dengan ekspansi Amerika ke wilayah barat. Pada awal abad ke-19, ekonomi Amerika mengalami pertumbuhan pesat, sebagian besar berkat industri pertanian di Selatan yang sangat bergantung pada tenaga kerja budak (Zinn, 2003). Dalam hal ini kapas menjadi komoditas utama, terutama setelah penemuan mesin gin kapas oleh Eli Whitney pada tahun 1793, yang membuat pengolahan kapas lebih efisien. Permintaan tenaga kerja budak pun meningkat, dan perbudakan semakin dipandang sebagai fondasi ekonomi negara bagian Selatan. Di wilayah Selatan, para pemilik budak semakin mengembangkan ideologi supremasi kulit putih untuk membenarkan dan mempertahankan perbudakan. Mereka membangun narasi bahwa orang kulit hitam secara alami lebih rendah dan tidak mampu mengatur hidup mereka sendiri tanpa pengawasan orang kulit putih. Para teolog, ilmuwan, dan politisi di Selatan mengadopsi teori-teori rasial yang mendukung pandangan ini, memberikan justifikasi moral dan intelektual bagi perbudakan yang brutal (Coleman, 2007)

Meskipun supremasi kulit putih semakin mendominasi di wilayah Selatan, di Utara, gerakan abolisionis (anti-perbudakan) mulai berkembang pada awal abad ke-19. Tokoh-tokoh seperti Frederick Douglass, mantan budak yang menjadi orator dan penulis terkenal, serta William Lloyd Garrison, seorang jurnalis radikal, mulai menyerukan penghapusan perbudakan dan kesetaraan rasial. Gerakan abolisionis menantang supremasi kulit putih, baik

secara moral maupun politik. Ketegangan antara negara bagian yang mendukung perbudakan dan yang menentangnya semakin meningkat seiring dengan perluasan wilayah Amerika Serikat. Setiap kali wilayah baru dimasukkan ke dalam Amerika, pertanyaan tentang apakah wilayah tersebut akan mengizinkan perbudakan menjadi titik perdebatan utama. “Kompromi *Missouri*” tahun 1820, yang membatasi perbudakan di wilayah barat di atas garis paralel 36°30’, adalah salah satu upaya awal untuk menyeimbangkan kepentingan negara-negara bagian yang pro-perbudakan dan anti-perbudakan. Namun, ketegangan ini terus berlanjut dan semakin memanas seiring dengan meningkatnya dorongan ekspansionis dan munculnya wilayah-wilayah baru yang diperdebatkan statusnya terkait perbudakan (Pierce Forbes, 2009).



Gambar 2. 1 Blackface Minstrelsy Actor

Source: <https://archive.org>

Melalui beberapa agenda orang-orang kulit hitam seperti membuat gerakan abolisionis sebagai bentuk penyeruan penghapusan perbudakan dan penyeruan kesetaraan rasial, serta berbagai bentuk perlawanan lainnya, orang-orang kulit putih sebagai ras yang mendominasi menggunakan blackface di tahun 1830-an untuk mempertahankan dominasi ras mereka. Blackface sendiri merupakan bentuk *cultural appropriation* yang dipertontonkan dalam bentuk minstrel shows melalui pertunjukan hiburan yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih dengan wajah dicat hitam untuk meniru dan merendahkan orang kulit hitam dengan menggambarkan bahwa orang-orang kulit hitam merupakan bentuk dari kebodohan. Blackface dan minstrel shows berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan supremasi kulit putih, dengan membingkai orang kulit hitam sebagai kelompok yang inferior secara intelektual dan moral. Pertunjukan ini menjadi sangat populer dan melanggengkan stereotip rasial yang merendahkan, sehingga berpengaruh kuat pada persepsi masyarakat terhadap orang Afrika-Amerika.

Kemudian kasus “Dred Scott v. Sandford” pada tahun 1857 menjadi salah satu keputusan hukum yang paling kontroversial dan memperjelas supremasi kulit putih yang mendominasi institusi negara. Mahkamah Agung Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan “Hakim Ketua Roger Taney”, memutuskan bahwa orang kulit hitam, baik yang diperbudak maupun yang bebas, tidak bisa menjadi warga negara Amerika Serikat dan oleh karena itu

tidak memiliki hak untuk menggugat di pengadilan federal. Keputusan ini secara langsung menegaskan bahwa orang kulit hitam tidak memiliki hak sipil atau hukum, memperkuat supremasi kulit putih dalam sistem hukum Amerika. Ini juga memicu kemarahan di kalangan abolisionis dan memperparah ketegangan antara negara bagian Utara dan Selatan (Zinn, 2003).



Gambar 2. 2 *Civil War* Amerika

Source: <https://aaregistry.org/>

Menjelang tahun 1861, perpecahan antara Utara dan Selatan mencapai puncaknya. Isu perbudakan dan supremasi kulit putih menjadi pusat konflik ini. Di Selatan, supremasi kulit putih diabadikan dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik, sementara di Utara, semakin banyak orang yang menolak sistem perbudakan dan mendukung hak-hak sipil bagi orang kulit hitam. Ketegangan ini akhirnya memicu Perang Saudara Amerika pada tahun 1861, yang menjadi

pertarungan untuk menentukan mengenai masa depan perbudakan dan supremasi kulit putih di Amerika Serikat (Zinn, 2003).

2.2 Blackface

2.2.1 *Blackface Minstrelsy* Pada Masa Pasca Perang Saudara (Era Rekonstruksi)

Pasca era perang saudara di Amerika yang melibatkan bagian Utara dan Selatan yang menghasilkan kemenangan bagi pihak Utara (*Union*), menandakan akhir dari sistem perbudakan dan memberikan kesempatan orang-orang kulit hitam untuk mendapatkan hak-hak mereka kembali. Melalui hal ini KKK dan organisasi kulit putih lainnya melakukan berbagai cara untuk mempertahankan *White Supremacy* sebagai Ideologi dan organisasi yang dominan. Salah satunya yaitu menggunakan blackface sebagai alat propaganda untuk menekan ras inferioritas kulit hitam agar tidak dapat menyuarakan hak-hak mereka. Dalam hal ini blackface memiliki beberapa fase dan tujuan yang berbeda pada setiap masanya, hal ini dilakukan oleh Berikut merupakan timeline tabel blackface era perang saudara hingga abad ke-21

Tabel 2. 1 *Mindmap Blackface* pada Setiap Era

No	Tahun	Fase Blackface	Keterangan
1	1865-1877	Fase blackface pada era Rekonstruksi	Pada era rekonstruksi, selain digunakan sebagai hiburan yang rasis, namun blackface juga digunakan untuk melawan upaya rekonstruksi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan hak politik bagiorang-orang kulit hitam. Hal ini dilakukan karena pasca terjadinya perang saudara beberapa pergerakan perlawanan terhadap dominasi kulit putih melalui beberapa aksi telah dilancarkan melalui gerakan abolisi, selain hal tersebut orang-orang kulit hitam telah memasuki dunia politik, serta berbagai sektor lainnya di Amerika Serikat pada era ini. Sehingga melalui hal ini orang-orang kulit putih dengan pemahaman ideologi <i>white supremacy</i> menggunakan blackface sebagai media yang menggambarkan orang-orang kulit hitam adalah orang yang bodoh, malas gemar melakukan korupsi, serta tidak

No	Tahun	Fase Blackface	Keterangan
			kompeten dalam pekerjaan mereka (Lott, 2013).
2	1877-1900	Fase blackface pada era pasca Rekonstruksi (Era <i>Gilded Age</i>)	Dalam fase <i>Gilded Age</i>, selain blackface digunakan sebagai simbol budaya yang mendukung hierarki rasial serta memperkuat narasi normalisasi terkait segregasi rasial. Beberapa bentuk adaptasi dari blackface pada era Rekonstruksi yaitu: 1. <i>Vaudeville minstrelsy</i>, merupakan tradisi teater masyarakat Eropa yang dikembangkan di Amerika Serikat pada akhir 1900-an. Berbeda dengan <i>blackface minstrelsy</i> pada umumnya, dalam pertunjukkan <i>Vaudeville</i> tidak hanya mempertontonkan blackface yang berisikan musik, komedi, dan drama namun juga menampilkan sulap, akrobat dan tarian. Salah satu tokoh yang terkenal dan memulai karir

No	Tahun	Fase Blackface	Keterangan
			aktornya yaitu Charlie Chaplin (Lott, 2013).
			2. Kebijakan “ <i>Black Codes</i> ” yang digunakan untuk memberikan batasan pada orang kulit hitam. Kebijakan tersebut mengatur akses terhadap pekerjaan, Membatasi mobilitas, Menetapkan aturan ketat mengenai hak kepemilikan property (Lott, 2013).
			3. Dibuatnya undang-undang yang terinspirasi dari kebijakan “ <i>Black Codes</i> ” mengenai segregasi rasial yang dikenal sebagai “ <i>Jim Crow Laws</i> ”. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya <i>Jim Crow Laws</i> mengatur pemisahan di sekolah, fasilitas umum, transportasi, dan banyak aspek kehidupan lainnya (Woodward, 2001).

No	Tahun	Fase Blackface	Keterangan
3	1900-1940	Fase blackface era awal abad ke-20	Pada fase abad ke-20 industri film mulai berkembang. Blackface yang mulanya merupakan <i>minstrelsy</i> kemudian beradaptasi menjadi film, salah satu film yang terkenal pada masa tersebut yang menjadi kontroversial yaitu film “ <i>The Birth of Nation</i> ” yang diproduksi di California pada tahun 1915. Film yang menggabungkan antara seni dan rasisme ini memberikan representasi kepada penontonnya bahwa orang kulit hitam “dengan aktor kulit putih yang menggunakan blackface” merupakan makhluk yang primitif, terbelakang, pelaku kekerasan seksual, serta beberapa stereotipe lain yang cenderung pada penggambaran tindakan rasis dan diskriminasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan bahwa orang kulit hitam merupakan ancaman bagi orang kulit putih, serta digunakan untuk dipersembahkan

No	Tahun	Fase Blackface	Keterangan
			kepada <i>Klu Klux Klan</i> (KKK) yang digambarkan sebagai pahlawan bagi orang-orang kulit putih.
4	1940-1970	Fase blackface era pertengahan abad ke-20	Pada era pertengahan abad Amerika Serikat yang berada pada transformasi yang ditandai dengan peningkatan kesadaran public terhadap isu rasial melalui berbagai gerakan yang terjadi, melalui salah satu contohnya adalah <i>civil rights movements</i> yang terjadi pada tahun 1950-1960. Hal ini menjadikan blackface menjadi salah satu pertunjukkan yang menjadi kontroversial dan memunculkan kritik terhadap praktik ini dari aktivis dan intelektual orang-orang kulit hitam. Walaupun demikian blackface beralih ke dalam program komedi Tv populer seperti <i>The Amos 'n' Andy Show</i> (1950). Pada tahun 1960 gerakan hak-hak sipil memberikan pengaruh yang signifikan

No	Tahun	Fase Blackface	Keterangan
			terhadap perjuangan representasi yang lebih adil bagi orang-orang kulit hitam di media. melalui Gerakan nasional seperti <i>National Association for the Advancement of Colored People</i> (NAACP), yang pada akhirnya orang-orang kulit hitam mendapatkan posisi yang adil dalam dunia perfilman, hal ini dapat dilihat melalui beberapa film yang diperankan oleh Sidney Poitier seperti <i>Guess Who's Coming to Dinner</i> (1967) dan <i>In the Heat of the Night</i> (1967). Dalam film ini ia diperankan sebagai orang kulit hitam yang terhormat, dan cerdas, yang mna hal ini bertentangan dengan stereotipe lama daripada blackface (Brooker, 2019).
5	1980-2000	Fase blackface era akhir abad ke-20	Dalam fase akhir abd ke-20 ini blackface masuk ke dalam berbagai sektor dalam tatanan masyarakat seperti contoh mahasiswa yang menggunakan kostum blackface saat acara pesta kostum atau

No	Tahun	Fase Blackface	Keterangan
			beberapa acara besar kampus, melalui media hiburan terdapat beberapa acara komedi yang menggunakan elemen elemen dari blackface. Pertumbuhan blackface ke berbagai sektor ini menuai banyak kritik dan kecaman dari aktivis kulit hitam, dan hal ini memberikan pengaruh terhadap pola pikir kritis masyarakat terkait penolakan praktik-praktik rasis yang yang sebelumnya dianggap dapat ditolerir.
6	2000- Sekarang	Fase blackface abad ke 21	Pada abad ke-21 blackface mengalami penurunan secara signifikan hal ini lantaran kesadaran sosial mengenai isu rasial telah meningkat, selain hal tersebut kemunculan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter/X yang mepercepat dalam penyebaran informasi mengenai kasus blackface lebih cepat ditangani oleh komunitas dan aktivis. Walaupun demikian

No	Tahun	Fase Blackface	Keterangan
			tidak semua lapisan masyarakat memahami akan sejarah dan dampak dari blackface sendiri, hal ini dapat dilihat melalui beberapa kasus yang terjadi pada abad ke-21 yaitu <i>pertama</i>, kontroversi Gubernur Virginia Ralph Northam yang terlibat menggunakan pakaian KKK dan blackface pada masa sekolah-nya (Kelly, 2019). <i>Kedua</i>, <i>Tv Series “Scrubs 2001-2010”</i> yang menghapus beberapa adegan karena menggunakan unsur blackface (Carr, 2022). <i>Ketiga</i>, pada tahun 2019 Gucci mengeluarkan produk berupa <i>turtleneck</i> dengan fitur kerah yang dapat digulung dan memiliki motif gambar bibir tebal (Held, 2019). <i>Keempat</i>, Pada tahun 2020 <i>Fashion Institute of Technology (FIT)</i> yang menggunakan aksesoris rasis berupa bibir tebal dan telinga lebar (Asmelash, 2020).

Melalui beberapa kasus terkait dominasi kulit putih yang kian meningkat serta orang-orang kulit hitam dengan perlawanannya seperti beberapa gerakan abolisionis, dan bentuk perlawanan lainnya maka terjadilah perang saudara Amerika dengan tujuan untuk mengakhiri sistem perbudakan serta ketidak setaraan. Perang Saudara Amerika (1861-1865) merupakan salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah Amerika Serikat, yang menandai akhir dari perbudakan di negara tersebut dan mengubah arah bangsa. Namun, meskipun perang berakhir dengan kemenangan Uni dan penghapusan perbudakan melalui Amandemen ke-13 pada tahun 1865, tantangan besar masih menanti dalam membangun kembali negara dan menentukan nasib jutaan orang Afrika-Amerika yang baru saja dibebaskan. Setelah Perang Saudara Amerika berakhir pada tahun 1865, negara memasuki sebuah periode penting dan penuh tantangan yang dikenal sebagai “Era Rekonstruksi”. Perang telah meninggalkan jejak kehancuran yang mendalam, dan negara menghadapi tugas monumental untuk menyatukan kembali wilayah utara dan selatan serta membangun kembali struktur sosial dan politik yang baru. Tujuan utama dari Rekonstruksi adalah untuk memasukkan orang-orang kulit hitam (mantan budak) ke dalam masyarakat dengan cara yang adil dan setara. Pada awal Era Rekonstruksi, pemerintah federal melaksanakan sejumlah kebijakan untuk mendukung integrasi sosial dan politik mantan budak. Berikut beberapa kebijakan yang direkonstruksi dalam rangka memberikan kesetaraan pada masyarakat Amerika khususnya bagi budak (Brooker, 2019).

Tabel 2. 2 Hasil Reformasi Amandemen

Amandemen	Tahun	Tujuan Rekonstruksi
<i>13th Amendment</i>	1865	Menghapuskan perbudakan secara resmi di seluruh Amerika Serikat (Brooker, 2019).
<i>14th Amendment</i>	1868	Memberikan kewarganegaraan dan perlindungan hukum yang setara kepada semua orang yang lahir di AS, termasuk mantan budak (Brooker, 2019).
<i>15th Amendment</i>	1870	Melindungi hak suara tanpa memandang ras, warna kulit, atau status sebagai mantan budak (Brooker, 2019).

Kebijakan-kebijakan melalui Reformasi memberikan hasil orang-orang kulit hitam yang mulai masuk ke kursi pemerintahan seperti Hiram Revels dan

Blanche K. Bruce sebagai senator pertama dari komunitas Afrika-Amerika. Selain hal tersebut kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk memperluas hak-hak sipil dan memberikan peluang baru kepada orang kulit hitam di seluruh negeri. Namun, Era Rekonstruksi menghadapi berbagai tantangan berat. Di selatan, kelompok-kelompok supremasi kulit putih seperti *Ku Klux Klan* (KKK) mulai muncul, menggunakan kekerasan, teror untuk menekan hak-hak orang kulit hitam dan membangun kembali supremasi kulit putih, dan blackface yang juga digunakan sebagai alat propaganda yang digunakan untuk memberikan representasi bahwa orang-orang kulit hitam merupakan orang yang korup, pemalsa, tidak layak, dan bodoh (Lott, 2013). Dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan sering kali tidak dapat bertahan lama karena penarikan dukungan federal setelah *Compromise of 1877*, yang mengakhiri Rekonstruksi dan memungkinkan penguasa kulit putih di Selatan untuk kembali mengendalikan wilayah tersebut (Brooker, 2019).

Selama dan setelah periode Rekonstruksi pada era *Gilded Age*, *blackface minstrelsy* menjadi bentuk hiburan yang sangat populer dan berjaya di Amerika Serikat sejak 1880an-1930an. Pemeran yang terkenal yaitu Thomas Dartmouth Rice dengan nama panggung melalui karakter yang dibuatnya yaitu “*Jim Crow*”. Dalam pertunjukan ini, artis kulit putih mengenakan make-up hitam dan kostum untuk meniru stereotip rasial negatif tentang orang kulit hitam. Mereka sering menggambarkan orang kulit hitam sebagai bodoh, malas, atau primitif, dan pertunjukan ini memperkuat pandangan rasis yang ada di

masyarakat. Blackface minstrelsy tidak hanya menghibur tetapi juga berfungsi propaganda yaitu memperkuat ideologi supremasi kulit putih dan menormalkan pandangan yang merendahkan tentang orang kulit hitam (Lott, 2013). Dalam hal ini meskipun warga Afrika-Amerika dan sekutunya berhasil meraih pencapaian besar selama era *Reconstruction* di bawah perlindungan tentara federal di Selatan, banyak kemajuan ini perlahan dibatalkan setelah berakhirnya *Reconstruction Era*. Dalam periode ini, nasib warga Afrika-Amerika diserahkan kembali kepada negara-negara bagian, yang sebagian besar dikuasai oleh pihak yang menentang persamaan hak. Negara-negara bagian Utara maupun Selatan pada tahun 1881 mulai memberlakukan undang-undang segregasi yang dikenal sebagai *Jim Crow laws*, yang secara ketat memisahkan warga berdasarkan ras. Kebijakan ini terinspirasi dari kebijakan sebelumnya yaitu "*Black Codes*", yang telah ada sejak 1865–1866. Kebijakan *Black Codes* berisi Mengatur akses terhadap pekerjaan, Membatasi mobilitas, Menetapkan aturan ketat mengenai hak kepemilikan properti. Sedangkan kebijakan *Jim Crow laws* mencakup pemisahan di sekolah, fasilitas umum, transportasi, dan banyak aspek kehidupan lainnya, sehingga memperkuat diskriminasi rasial. Selain itu, mereka memberlakukan berbagai hambatan yang bertujuan untuk mencegah warga Afrika-Amerika menggunakan hak pilih mereka, seperti tes literasi, pajak pemilih, dan aturan "*Grandfather Clause*" yang sengaja dirancang untuk menyingkirkan pemilih kulit hitam. Kelompok supremasi kulit putih, termasuk *Ku Klux Klan* (KKK), menggunakan kekerasan, teror, dan

intimidasi untuk menghalangi orang Afrika-Amerika dari kehidupan sipil dan politik yang bebas. Aksi brutal ini sering kali didukung secara diam-diam atau bahkan terbuka oleh aparat hukum dan peradilan, yang jarang memberikan perlindungan atau keadilan bagi korban. Dengan cara ini, Jim Crow laws dan aksi kekerasan yang menyertainya berhasil merampas hak dan martabat warga Afrika-Amerika, menjadikan mereka warga negara kelas dua di negeri mereka sendiri selama hampir satu abad (Brooker, 2019).

Walaupun telah dilakukannya *Compromise of 1877*, namun berbagai teror dari *white supremacy* melalui berbagai cara masih terus menerus dilancarkan melalui berberapa aksi yang dilakukan seperti salah satunya melalui legalitas hukum yaitu “*Jim Crow laws*”. Maka dalam hal ini upaya orang-orang kulit hitam dalam melakukan perlawanan terhadap *white supremacy* beragam dan melibatkan berbagai bentuk perjuangan. Gerakan abolisionis dan hak sipil yang muncul sebelum dan sesudah perang terus berjuang melawan sistem rasisme yang mengakar. Salah satu bentuk perlawanan *White Supremacy* yaitu kelahiran organisasi *National Association of Colored Women* (NACW) yang didirikan oleh Mary Church Terrell, Ida B. Wells-Barnett, Frances E.W. Harper, Harriet Tubman, dan Josephine St. Pierre Ruffin. NACW bergerak dalam melawan diskriminasi dan seksis dari kaum kulit putih. NACW berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak sipil pada era *Jim Crow Laws*, yang mana dalam hal ini NACW menciptakan ruang dimana wanita kulit putih dapat bersura, serta menciptakan perubahan sosial

melalui beberapa aktivitas seperti mendirikan sekolah, mendirikan rumah yatim piatu, klinik, serta membuat komunitas kecil untuk membantu keluarga kulit hitam yang kurang mampu (Brooker, 2019).

2.2.2 Blackface Abad Ke-20 Hingga Abad Ke-21

Blackface, sebagai sebuah bentuk hiburan yang menciptakan dan memperkuat stereotip rasial negatif tentang orang kulit hitam, mengalami transformasi signifikan dari abad ke-20 hingga abad ke-21. Meskipun popularitasnya menurun, pengaruh dan kontroversi yang ditimbulkan oleh blackface tetap terasa hingga saat ini, mencerminkan perubahan dalam kesadaran sosial dan dinamika rasial di Amerika Serikat. Pada awal abad ke-20, blackface minstrelsy masih menjadi bentuk hiburan yang populer. Namun, periode ini juga menandai awal kritik terhadap praktik ini. Dengan munculnya gerakan Harlem Renaissance, yang menyoroti karya-karya sastra dan seni oleh orang kulit hitam, ada dorongan baru untuk mengevaluasi dan mengkritik representasi rasial yang merendahkan. Para penulis dan artis seperti Langston Hughes dan Zora Neale Hurston mulai mengangkat suara mereka menentang stereotip yang digambarkan dalam blackface (Brooker, 2019).



Gambar 2. 3 Civil Right Movements

Source: <https://www.nps.gov/index.htm>

Sekitar 1930-an hingga 1940-an, blackface masih muncul dalam beberapa program hiburan, termasuk radio dan televisi. Namun, meningkatnya kesadaran sosial dan kritik dari kelompok hak sipil mulai mengurangi penerimaan terhadap bentuk hiburan ini. Program-program seperti "*The Amos 'n' Andy Show*" menampilkan unsur blackface dan stereotip rasial, tetapi juga menjadi sasaran kritik publik dan akademik. Terdapat berbagai gerakan sebagai bentuk perlawanan. Pada pertengahan abad ke-20 tepatnya pada tahun 1950-an sampai 1960-an, blackface minstrelsy mulai kehilangan daya tariknya di mainstream media, seiring dengan kemajuan gerakan hak sipil. Aktivis seperti Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Sam Cooke, Malcolm X, dan beserta tokoh besar lainnya memperjuangkan kesetaraan rasial dan hak-hak sipil, menggeser

perhatian publik dari hiburan yang merendahkan ke isu-isu yang lebih mendalam dan mendesak (Brooker, 2019).



Gambar 2. 4 Gerakan Hak-hak Sipil

Source: <https://www.adl.org>

Gambar diatas “*Civil movement*” perubahan sosial yang signifikan, dengan gerakan hak sipil yang menentang rasisme dan diskriminasi. Film dan televisi mulai menampilkan representasi yang lebih positif dan kompleks tentang orang kulit hitam, mengurangi tempat blackface dalam budaya populer. Penampilan blackface dalam pertunjukan mulai dianggap tidak pantas dan kontroversial. Selain hal tersebut keberhasilan dari gerakan ini membawakan hasil terhadap penghapusan *Jim Crow laws* (Brooker, 2019).

Memasuki akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, blackface tidak lagi menjadi bagian dari hiburan mainstream, tetapi insiden-insiden terkait blackface masih muncul, sering kali menimbulkan kontroversi dan perdebatan publik. Kasus-kasus seperti kostum Halloween yang melibatkan elemen blackface memicu reaksi tegas dari masyarakat dan aktivis. Pada tahun 1990-an hingga 2000-an, Meskipun blackface menjadi semakin jarang dalam media utama, kasus-kasus terkait blackface, seperti kostum Halloween atau iklan yang melibatkan unsur blackface, terus menimbulkan kemarahan dan kritik dari komunitas kulit hitam dan pendukung kesetaraan rasial. Insiden-insiden ini sering kali menyoroti kurangnya pemahaman dan sensitivitas terhadap sejarah dan dampak dari blackface. Pada tahun 2010-an hingga 2020-an terdapat insiden seperti Film “*Scrubs*” yang menayangkan *blackface* dan *whiteface*, yang kemudian adegan tersebut dihapus (Carr, 2022). Kasus seorang gubernur Virginia, Ralph Northam yang terlibat dalam skandal blackface memperlihatkan bagaimana insiden ini dapat mempengaruhi karier politik dan memicu diskusi tentang ras dan representasi (Kelly, 2019). Kasus Gucci, dan Fashion of Technology (FIT) yang memperkenalkan produk melalui fashion show dengan unsur blackface menunjukkan bahwa isu ini tetap relevan. Pada Februari 2020, Fashion Institute of Technology (FIT) di New York mengadakan fashion show tahunan untuk mahasiswa tingkat akhir program Master of Fine Arts (MFA). Salah satu desainer, Junkai Huang, mempresentasikan koleksi yang menuai kontroversi karena penggunaan aksesoris yang dianggap rasis dan

menyerupai elemen stereotip *blackface*. Aksesoris tersebut meliputi penggunaan bibir tebal, telinga besar yang disebut "*monkey ears*", dan alis tebal, yang banyak pihak anggap sebagai representasi stereotip rasis terhadap orang kulit hitam. Dalam hal ini Junkai Huang menyatakan bahwa desain tersebut tidak bermaksud untuk melakukan tindakan rasis dan bahwa aksesoris tersebut mencerminkan tubuhnya sendiri. Namun, desain ini tetap menuai kritik karena dianggap sebagai manifestasi dari praktik *blackface* yang merendahkan karakteristik fisik orang-orang kulit hitam. Maka Huang meminta maaf secara terbuka atas kontroversi yang terjadi, meskipun ia mengklaim tidak mengetahui konteks sejarah rasisme terkait desainnya. Presiden FIT, Joyce F. Brown, juga meminta maaf dan berjanji untuk melakukan penyelidikan guna mencegah insiden serupa untuk kedepannya (Asmelash, 2020)

Kasus FIT 2020 menjadi unik, hal ini lantaran seorang model dalam acara tersebut yaitu Amy Lefevre, secara terbuka menyatakan keberatan terhadap penggunaan aksesoris kontroversial. Ia mengenali elemen seperti bibir besar dan "*monkey ears*" sebagai stereotip rasis dan menolak mengenakannya. Meskipun Amy menghadapi tekanan dari panitia, ia memutuskan untuk tetap berjalan di panggung tanpa aksesoris tersebut sebagai bentuk protes secara diam-diam terhadap konsep yang dianggapnya merendahkan. Tindakan Amy menjadi sorotan media, memicu diskusi lebih luas tentang rasisme dalam industri fashion dan pentingnya menghormati suara komunitas yang terwakili

dalam karya kreatif. Kasus ini menyoroti pentingnya kesadaran budaya dan sensitivitas terhadap sejarah rasisme dalam desain fashion. Keputusan Amy dan kritik publik mencerminkan perlunya partisipasi komunitas yang terdampak dalam proses kreatif untuk mencegah pengulangan kesalahan yang serupa (Asmelash, 2020).

Dalam penelitian Ini fashion show yang dilakukan oleh *Fashion Institute of Technology* (FIT) pada tahun 2020 digunakan sebagai studi kasus untuk memperdalam analisis blackface yang terjadi pada abad ke 21. Penggunaan FIT 2020 sebagai studi kasus dapat memberikan penjelasan yang komperhensif bagaimana rasisme dalam bentuk blackface masih saja hadir dan eksis hingga abad ke-21 ini melalui institusi pendidikan dan dalam industri mode fahion show. Dalam hal ini Fashion Institute of Technology (FIT) sebuah institusi pendidikan ternama di bidang mode membiarkan aksesoris dan simbol yang menyerupai blackface ditampilkan dalam peragaan busana 2020, ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan tindakan preventif dari institusi tersebut dalam melindungi nilai-nilai inklusif yang diharapkan dalam dunia pendidikan modern (Karimkhan, 2023). Seharusnya, sebagai lembaga yang mendidik calon desainer, FIT memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan yang peka terhadap isu-isu sosial dan historis yang terkait dengan karya-karya desain mereka, khususnya ketika berurusan dengan simbol-simbol yang memiliki sejarah rasis seperti blackface. Namun, peristiwa

ini menunjukkan bahwa mekanisme internal di FIT tidak efektif dalam mencegah penggunaan simbol rasis dalam peragaan busana mereka. Tidak adanya prosedur atau standar yang dapat mengidentifikasi dan menghentikan konten yang dapat dianggap rasis menjadi tanda bahwa institusi tersebut mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang sistem rasisme dalam lingkup pendidikan mode. Selain hal tersebut Susan B. Kaiser dan Susan C. Forunier industri mode yang merupakan salah satu alat budaya paling berpengaruh yang mampu menyebarkan dan memperkuat nilai-nilai serta citra yang dianggap "ideal" atau aspiratif di seluruh dunia (Jannah, 2023). Produk budaya yang dihasilkan oleh industri ini dari tren pakaian hingga representasi wajah dan tubuh dalam peragaan busana tidak hanya menggambarkan selera dan estetika, tetapi juga membentuk persepsi tentang kelas, ras, dan kecantikan yang dapat meresap ke dalam budaya global (Jannah, 2023). Dalam konteks ini, Fashion Show yang diselenggarakan oleh Fashion Institute of Technology (FIT) pada tahun 2020 menunjukkan sisi gelap industri mode yang masih kerap kali gagal menunjukkan sensitivitas budaya yang diharapkan dalam masyarakat yang semakin global dan terhubung. Pada acara ini, beberapa model tampil dengan aksesoris yang dianggap merujuk pada karikatur blackface yaitu berupa bibir besar yang mencolok dan telinga yang terlalu besar. Sebelum kejadian blackface dalam FIT berlangsung, pada tahun 2019 Gucci menggunakan tema yang berbau blackface namun dengan menggunakan turtle neck berwarna hitam dengan gambar bibir tebal. Melalui

apa yang terjadi pada fashion show Gucci dan kemudian yang terjadi pada fashion show FIT menunjukkan kekentalan sistem rasisme yang melekat pada lapisan masyarakat serta institusi yang acuh tak acuh terhadap permasalahan terkait isu rasial. Penampilan seperti ini memicu kritik keras karena dianggap menguatkan stereotip rasis yang menyakitkan dan tidak peka secara budaya (Jannah, 2023).

2.2.3 Blackface Effect

Melalui “*historical view*” pada penulisan diatas terkaait blackface sebagai bentuk rasisme yang memberikan efek buruk pada lapisan masyarakat Amerika khususnya pada orang-orang kulit hitam selaku korban dari bentuk rasisme ini, berikut merupakan beberapa efek yang diberikan dari blackface:

Tabel 2. 3 Efek Jangka Panjang Rasisme Dalam Bentuk Blackface

Blackface Effect	
1	Dampak Psikologis
	a. Trauma: Bagi individu kulit hitam, melihat representasi blackface dapat memicu trauma historis dan personal pada Individu: (Lott, 2013).
	b. Stres: Paparan terhadap blackface dapat menyebabkan stres psikologis kronis (Lott, 2013).

Blackface Effect

- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| | | c. Harga Diri: Dapat menurunkan harga diri dan rasa nilai diri pada individu dari kelompok yang ditargetkan (Lott, 2013). |
| 2 | Efek pada Anak-anak: | <p>a. Pembentukan Identitas: Anak-anak kulit hitam mungkin mengalami kebingungan identitas dan internalisasi stereotip negatif (Lott, 2013).</p> <p>b. Prasangka Dini: Anak-anak dari semua ras mungkin mengembangkan prasangka rasial sejak dini karena paparan terhadap blackface (Lott, 2013).</p> |
| 3 | Dampak Ekonomi: | <p>a. Diskriminasi Kerja: Stereotip yang diperkuat oleh blackface dapat mempengaruhi keputusan perekrutan dan promosi di tempat kerja (Lott, 2013).</p> <p>b. Representasi Media: Dapat membatasi peluang bagi aktor dan seniman kulit hitam dalam industri hiburan (Lott, 2013).</p> |
| 4 | Implikasi Hukum dan Kebijakan: | <p>a. Kebijakan Diskriminatif: Stereotip yang diperkuat oleh blackface dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan yang tidak adil (Lott, 2013).</p> <p>b. Penegakan Hukum: Dapat mempengaruhi cara penegak hukum memperlakukan individu kulit hitam (Lott, 2013).</p> |
-

Blackface Effect

5	Efek	pada	a. Bias Kurikulum: Penggunaan blackface dalam sejarah Pendidikan:
			dapat menyebabkan representasi yang tidak akurat dalam materi pendidikan (Lott, 2013).
			b. Lingkungan Belajar: Dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak nyaman atau bahkan bermusuhan bagi siswa kulit hitam (Lott, 2013).
6	Efek	pada	a. Hambatan Advokasi: Blackface dapat melemahkan Gerakan
			upaya advokasi untuk kesetaraan ras (Lott, 2013).
	Sosial:		b. Polarisasi: Dapat menyebabkan polarisasi dalam diskusi tentang isu-isu rasial (Lott, 2013).

Melalui tabel diatas dapat dipahami bahwa blackface atau tindakan rasis lainnya memberikan efek yang tidak hanya berpengaruh terhadap kehilangan identitas saja, namun juga memberikan efek mendalam bagi para korbannya. Blackface merupakan praktik rasis di mana orang kulit putih mengenakan makeup hitam dengan menggunakan semir sepatu dan berbagai bahan lainnya untuk menggambarkan stereotipe orang kulit hitam dengan cara yang sangat menghina. Blackface bukan sekadar kostum, melainkan bentuk rasisme sistematis yang dipergunakan untuk merendahkan dan merugikan komunitas kulit hitam (Lott, 2013).